



**RENCANA STRATEGIS
KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
2020—2024**

**BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAN**

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020—2024 menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat sebagai unit pelaksana teknis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa di daerah.

Renstra Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat memuat visi, misi, tujuan strategis, sasaran strategis, arah kebijakan, struktur program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat di sepuluh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Renstra ini digunakan sebagai pedoman dan garis haluan dalam pengelolaan kebahasaan dan kesastraan, terutama dalam merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan serta mengevaluasi hasil kinerjanya pada 2020—2024.

Mataram, September 2020
Kepala



Umi Kulsum, S.S., M.Hum.
NIP197301161997032001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Kondisi Umum	1
1.2 Permasalahan dan Potensi	3
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN	5
2.1 Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan	5
2.2 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan	6
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	8
3.1 Arah Kebijakan	8
3.2 Kerangka Regulasi	9
3.3 Kerangka Kelembagaan	9
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	11
4.1 Target Kinerja	11
4.2 Kerangka Pendanaan	12
BAB V PENUTUP	14
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

*"Kami poeta dan poetri Indonesia mendjoendjoeng
bahasa persatoean, bahasa Indonesia."
(Butir ketiga Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928)*

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Negara dan Lembaga Tahun 2020—2024 yang diamanatkan dalam Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005—2025. Demikian juga Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan Pengembangan Bahasa berkewajiban menyusun Renstra sebagai dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahun). Renstra ini memuat visi, misi, strategi, program, kegiatan, dan rencana aksi sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu melaksanakan pengkajian dan pemasyarakatan bahasa dan sastra Indonesia di provinsi wilayah kerja, yaitu Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terdiri atas 10 kabupaten/kota.

1.1 Kondisi Umum

Dalam melaksanakan pembangunan bidang kebahasaan dan kesastraan di Nusa Tenggara Barat periode 2015—2019, Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat memiliki sembilan sasaran kegiatan, yakni (1) meningkatnya kosakata bahasa Indonesia, (2) meningkatnya jumlah bahasa dan sastra yang terlindungi, (3) meningkatnya mutu dan jumlah penelitian kebahasaan dan kesastraan, (4) meningkatnya mutu dan jumlah bahan ajar pengayaan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia, (5) meningkatnya jumlah instrumen uji kemahiran berbahasa Indonesia, (6) meningkatnya jumlah tenaga profesional dan calon tenaga profesional yang terbina dalam penggunaan bahasa dan sastra, (7) meningkatnya jumlah ruang publik yang terkendali penggunaan bahasanya, (8) meningkatkan mutu dan jumlah bahan pengembangan strategi dan diplomasi kebahasaan, dan (9) terselenggaranya layanan dukungan manajemen teknis di lingkungan badan bahasa.

Sasaran kegiatan yang pertama, meningkatnya kosakata bahasa Indonesia, diukur melalui indikator kinerja kegiatan (IKK) Jumlah Kosakata Indonesia. Pencapaian IKK tersebut dilakukan melalui pengiriman usulan kosakata bahasa daerah yang ada di Nusa Tenggara Barat sebagai kosakata baru bahasa Indonesia. Secara kumulatif capaian IKK Jumlah Kosakata Indonesia adalah sebesar 185% atau 18.518 lema dari 10.000 lema yang telah ditetapkan.

Sasaran kegiatan yang kedua, meningkatnya jumlah bahasa dan sastra yang terlindungi, diukur melalui IKK Jumlah Bahasa dan Sastra yang Terpetakan, Tekonservasi, dan Terevitalisasi. Pencapaian IKK tersebut dilakukan melalui kajian vitalitas, revitalisasi, dan pemetaan bahasa daerah yang ada di Nusa Tenggara Barat. Secara kumulatif capaian IKK Jumlah Bahasa dan Sastra yang Terpetakan, Tekonservasi, dan Terevitalisasi adalah sebesar 110% atau 34 dari 31 naskah yang telah ditetapkan.

Sasaran kegiatan yang ketiga, meningkatnya mutu dan jumlah penelitian kebahasaan dan kesastraan, diukur melalui IKK Jumlah Penelitian Bahasa dan Sastra. Pencapaian IKK tersebut dilakukan melalui penelitian bahasa dan sastra dan publikasi ilmiah bahasa dan sastra. Secara kumulatif capaian IKK Jumlah Penelitian Bahasa dan Sastra adalah sebesar 131% atau 25 naskah dari 18 naskah yang telah ditetapkan.

Sasaran kegiatan yang keempat, meningkatnya mutu dan jumlah bahan ajar pengayaan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia, diukur melalui IKK Jumlah Bahan dan Modul Pembelajaran Bahasa dan Sastra. Pencapaian IKK ini dilakukan melalui penyusunan bahan mulok, bahan literasi, dan sayembara pembuatan buku bacaan dalam rangka penyediaan bahan bacaan untuk mendukung gerakan literasi sekolah. Secara kumulatif capaian IKK Jumlah Bahan dan Modul Pembelajaran Bahasa dan Sastra adalah sebesar 135% atau 70 bahan bacaan dari 54 bahan bacaan yang ditetapkan.

Sasaran kegiatan yang kelima, meningkatnya jumlah instrumen uji kemahiran berbahasa Indonesia, diukur melalui IKK Jumlah Instrumen Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia. Pencapaian IKK ini dilakukan melalui pengusulan baterai soal UKBI dari Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat ke Badan Bahasa. Capaian Kumulatif dari IKK ini adalah sebesar 80% atau 4 baterai soal dari 5 baterai soal yang ditetapkan.

Sasaran kegiatan yang keenam, meningkatnya jumlah tenaga profesional dan calon tenaga profesional yang terbina dalam penggunaan bahasa dan sastra, diukur

melalui IKK Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional yang Terbina dalam Penggunaan Bahasa dan Sastra dan Jumlah Generasi Muda Pengapresiasi Bahasa dan Sastra. Pencapaian kedua IKK tersebut dilakukan melalui kegiatan penyuluhan, pembinaan, sosialisasi, bimbingan teknis, diseminasi, dan lomba-lomba kebahasaan dan kesastraan dengan sasaran guru Bahasa Indoensia, guru mata pelajaran lainnya, staf pengajar, mahasiswa, dan siswa semua jenjang. Capaian kumulatif IKK ini sebesar 114% atau 11.436 orang dari 10.000 ribu orang yang telah ditetapkan.

Sasaran kegiatan yang ketujuh, meningkatnya jumlah ruang publik yang terkendali penggunaan bahasanya, diukur melalui IKK Jumlah Badan Publik yang Terkendali Penggunaan Bahasanya dan Jumlah Bahasa Swasta yang Terkendali Penggunaan Bahasanya. Pencapaian kedua IKK ini dilakukan melalui kegiatan Aksi Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang Publik, Lomba Wajah Bahasa Sekolah dan Sektor Pariwisata, dan Diskusi Kelompok Terpumpun dengan Pelaku Media. Capaian kumulatif IKK ini sebesar 107% atau 279 lembaga dari 261 lembaga yang telah ditetapkan.

Sasaran kegiatan yang kedelapan, meningkatkan mutu dan jumlah bahan pengembangan strategi dan diplomasi kebahasaan, diukur dari IKK Jumlah Bahan Ajar BIPA. Pencapaian IKK ini dilakukan melalui kegiatan penyusunan bahan ajar BIPA. Sasaran kegiatan dan IKK ini tidak dilaksanakan UPT pada tahun 2018 dan 2019. Capaian kumulatif IKK ini sebesar 60% atau 3 bahan ajar dari 5 bahan ajar yang ditetapkan.

Sasaran kegiatan yang kesembilan, terselenggaranya layanan dukungan manajemen teknis di lingkungan badan bahasa, diukur melalui IKK Layanan Dukungan Manajemen Eselon 1, Layanan Internal, dan Layanan Perkatoran. Capaian ini IKK ini secara kumulatif adalah nilai SAKIP Kantor Bahasa Provisi Nusa Tenggara Barat adalah predikat B.

1.2 Permasalahan dan Potensi

1.2.1 Permasalahan

Ketercapaian target renstra Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat pada periode 2015—2019 sangat Baik. Namun, terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut.

- Pergantian kepala daerah yang menyebabkan perubahan arah kebijakan yang berdampak pada pelaksanaan kegiatan kebahasaan dan kesastraan.
- Masuknya arus informasi yang tanpa saringan dan adanya pengaruh globalisasi yang tanpa batas.
- Rendahnya sikap masyarakat terhadap penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Di Nusa Tenggara Barat, apresiasi masyarakat terhadap penggunaan dan pengutamaan bahasa Indonesia masih cukup rendah. Hal ini merupakan permasalahan sekaligus tantangan yang sangat besar bagi Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat.

1.2.2 Potensi

Agar kegiatan kebahasaan yang kesastraan pada Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat memberikan dampak yang lebih luas maka perlu dioptimalkan beberapa potensi berikut.

- Keragaman etnis yang memperkaya kergamaman bahasa dan sastra daerah.
- Sebelas bahasa daerah yang ada di Nusa Tenggara Barat sangat potensial untuk memperkaya kosakata bahasa Indonesia dan untuk mengembangkan dan memajukan kebudayaan daerah.
- Keragaman etnis yang menunjukkan keragaman tradisi dan budaya berpotensi memperkaya kamus, glosariun, dan ensiklopedia bahasa dan sastra daerah.
- Komunitas literasi yang tersebar pada setiap kabupaten/kota memiliki potensi yang besar untuk memajukan literasi nasional

BAB II
VISI, MISI, DAN TUJUAN
KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Visi Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2020—2024 mengacu kepada visi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang diturunkan dari Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu:

"terwujudnya insan berkarakter dan jati diri bangsa melalui bahasa dan sastra di Provinsi Nusa Tenggara Barat".

Untuk mewujudkan visinya, Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki misi sebagai berikut:

- 1) meningkatkan mutu kebahasaan dan pemakaiannya di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- 2) meningkatkan keterlibatan peran bahasa dan sastra dalam membangun ekosistem pendidikan dan kebudayaan di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- 3) meningkatkan keterlibatan para pemangku kepentingan dalam pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- 4) meningkatkan peran aktif diplomasi dalam internasionalisasi kebahasaan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

2.1 Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan

Sesuai dengan sasaran program Badan Bahasa, seluruh kegiatan pada Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki empat tujuan yaitu: (1) meningkatkan kemahiran penutur bahasa Indonesia, (2) meningkatnya budaya literasi, (3) meningkatnya daya hidup bahasa daerah, dan (4) terwujudnya tata kelola lembaga yang berkualitas.

Indikator kinerja tujuan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat pada akhir tahun renstra adakah menukung ketercapaian Indikator Kinerja Program Badan Bahasa yaitu tercapainya: (1) persentase penutur bahasa Indonesia mahir teruji sebesar 50%, (2) persentase wilayah yang mengutamakan bahasa Indonesia di ruang publik sebesar 65%, (3) nilai dimensi budaya literasi IPK (indeks pembangunan

kebudayaan) sebesar 71,04, (4) indeks daya hidup bahasa daerah sebesar 0,59, dan (5) Predikat SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa minimal BB.

2.2 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan

Sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan Kantor Bahasa Provisnis Nusa Tenggara Barat bisa dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan	
1	Meningkatnya Daya Ungkap Bahasa Indonesia	1.1	Jumlah Kosakata Bahasa Indonesia
2	Terwujudnya Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia	2.2	Jumlah rekomendasi kebijakan kebahasaan dan kesastraan melalui penelitian
3	Terwujudnya Penggunaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik	3.1	Jumlah lembaga pengguna bahasa Indonesia terbina
4	Meningkatnya Jumlah Penuur Bahasa Terbina	4.2	Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional Terbina Kemahirab Berbahasa dan Bersastra
5	Terlindungi Bahasa dan Sastra Daerah yang Kritis dan Terancam Punah	5.1	Jumlah Penutur Muda yang Terlibat dalam Pelindungan Bahasa Daerah Kritis dan Terancam Punah
		5.2	Jumlah Penutur Muda yang Terlibat dalam Pelindungan Sastra Daerah Kritis dan Terancam Punah
		5.3	Jumlah Produk Kesastraan Terkembangkan
6	Meningkatnya Tata Kelola Satuan Kerja di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	6.1	Predikat SAKIP Satker minimal BB
		6.2	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker Minimal 91

Sumber: Renstra Badan Bahas

A. Tata Nilai

Nilai-nilai organisasi merupakan salah satu acuan yang dapat diyakini, dihayati, serta diamalkan oleh seluruh pegawai Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi. Nilai-nilai tersebut tumbuh dan berkembang dalam organisasi serta dapat berfungsi sebagai pendorong berkembangnya semangat untuk berusaha memberikan yang terbaik.

Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020—2024 telah menetapkan tujuh tata nilai yang disepakati untuk dijadikan dasar sekaligus arah bagi sikap dan perilaku seluruh pegawai Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tata nilai yang dimaksud adalah sebagai berikut.

1) Berintegritas

Konsisten dan teguh dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan, terutama dalam hal kejujuran dan kebenaran dalam tindakan, memiliki integritas, bersikap jujur, dan mampu mengemban kepercayaan.

2) Kreatif dan inovatif

Memiliki pola pikir, cara pandang, dan pendekatan yang variatif terhadap setiap permasalahan serta mampu menghasilkan karya baru.

3) Inisiatif

Inisiatif adalah kemampuan bertindak melebihi yang dibutuhkan atau yang dituntut dari pekerjaan, melakukan sesuatu tanpa menunggu perintah lebih dahulu dengan tujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan hasil pekerjaan, menciptakan peluang baru, atau untuk menghindari timbulnya masalah.

4) Pembelajar

Berkeinginan dan berusaha untuk selalu menambah dan memperluas wawasan, pengetahuan, dan pengalaman serta mampu mengambil hikmah dan menjadikan pelajaran atas setiap kejadian.

5) Menjunjung meritokrasi

Memiliki pandangan yang memberi peluang kepada orang untuk maju berdasarkan kelayakan dan kecakapannya.

6) Aktif

Suka berusaha mencapai tujuan bersama serta memberikan dorongan agar pihak lain tergerak untuk menghasilkan karya terbaiknya.

7) Tanpa pamrih

Tidak memiliki maksud yang tersembunyi untuk memenuhi keinginan dan memperoleh keuntungan pribadi, memberikan dorongan dan semangat bagi pihak lain untuk senang berusaha mencapai tujuan bersama, memberikan inspirasi, dan memberikan dorongan agar pihak lain tergerak untuk menghasilkan karya terbaiknya.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3. 1 Arah Kebijakan dan Strategi

Kebijakan dan strategi Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat mengacu pada arah kebijakan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa untuk mendorong tercapainya sasaran strategis yang mendukung penguatan budaya, bahasa dan pendidikan karakter. Arah kebijakan tersebut dilaksanakan pada bidang berikut: (1) peningkatan tata kelola pengembangan dan pembinaan bahasa dan sastra melalui dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra; (2) pengembangan dan perlindungan bahasa dan sastra; dan (3) pembinaan bahasa dan sastra.

Arah Kebijakan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat merujuk pada Agenda Pembangunan RPJMN 2020—2024 yang terkait dengan dua bidang yang menjadi ranah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, yaitu pada bidang pendidikan dan kebudayaan. Pada bidang pendidikan, Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat mendukung arah kebijakan meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas, strategi yang digunakan peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran melalui berbagai aktivitas terutama yang terkait dengan bahasa dan sastra di daerah.

Pada bidang kebudayaan, Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat juga mengacu pada Badan pengembangan dan Pembinaan Bahasa, yaitu mendukung melaksanakan peningkatan literasi membaca dan menulis di daerah Nusa Tenggara Barat. Strategi yang dilaksanakan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu: (1) peningkatan budaya literasi di daerah Nusa Tenggara Barat; (2) pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra di daerah Nusa Tenggara Barat; dan (3) penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi melalui berbagai aktivitas di daerah Nusa Tenggara Barat. Kedua bidang pendidikan dan kebudayaan itu dilaksanakan untuk

mendukung keberhasilan agenda pembangunan 2020—2025. Kegiatan yang terkait dengan hal itu dapat dilihat pada sasaran kegiatan Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat.

3. 2 Kerangka Regulasi

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsinya, kerangka regulasi Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat menginduk pada kerangka regulasi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

3. 3 Kerangka Kelembagaan

Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat pertama kali terbentuk pada tahun 2003 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 157/O/2003, Tanggal 17 Oktober 2003 tentang Persetujuan Pembentukan Lima Buah Kantor Bahasa di Lima Provinsi dan salah satunya adalah Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Keputusan menteri tersebut diperkuat lagi dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2012 tentang Keberadaan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berikutnya, lahir Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja.

Pada awal berdirinya, Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat menempati ruang di Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sejak akhir tahun 2006 mulai menempati kantor baru yang beralamat di Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram. Sejak berdirinya sampai saat ini, Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat telah dipimpin oleh lima orang, yaitu Prof. Dr. Mahsun, M.S. (2004—2009), Dra. Yeyen Maryani, M.Hum. (Plt. 2009—2012), Dr. Syarifuddin, M.Hum. (2012—2018), Drs. Songgo Siruah, M.Pd. (2018—Mei 2019), dan Umi Kulsum, M.Hum. (Juni 2019—Sekarang).

3.3.1 Struktur organisasi

Struktur Organisasi Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai dengan Organisasi dan Tata Kerja Permendikbud Nomor 26 Tahun 2020 adalah sebagai berikut.



3.3.2 Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Pegawai Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat berjumlah 37 Pegawai Negeri Sipil dengan kualifikasi pendidikan sebagai berikut:

1. SMA sebanyak 2 orang;
2. D-3 sebanyak 3 orang;
3. S-1 sebanyak 22 orang; dan
4. S-2 sebanyak 10 orang.

Peta jabatan pegawai pada Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat bisa dilihat pada tabel berikut.

No	Nama Jabatan	Jumlah pegawai
1	Fungsional peneliti	11 orang
2	Fungsional penerjemah	4 orang
3	Analisis Kata dan Istilah	4 orang
4	Pengkaji Bahasa dan Sastra	2 orang
5	Pengadministrasi BMN	1 orang
6	Pengadministrasi Keuangan	3 orang
7	Bendahara	1 orang
8	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	1 orang
9	Pengelola Barang Milik Negara	1 orang
10	Pengadministrasi Kepegawaian	1 orang
11	Pengelola Situs atau Web	1 orang
12	Pengelola Data Tata Organisasi dan Tata Laksana	1 orang
13	Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi	1 orang
14	Pengadministrasi Perpustakaan	1 orang
15	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	1 orang
16	Verifikator Keuangan	1 orang
17	Pengadministrasi Persuratan	1 orang

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Target kinerja berdasarkan sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2020—2024 seperti dipaparkan pada tabel berikut.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	SATUAN	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya Daya Ungkap Bahasa Indonesia	Kamus dan Pengembangan Istilah	Lema	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	Terwujudnya Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia	Jumlah rekomendasi kebijakan kebahasaan dan kesastraan melalui penelitian	Dokumen	1	1	1	1	1
3	Terwujudnya Penggunaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik	Jumlah lembaga pengguna bahasa Indonesia terbina	Lembaga	100	150	200	200	250
4	Meningkatnya Jumlah Penuur Bahasa Terbina	Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional Terbina Kemahirab Berbahasa dan Bersastra	Orang	1.515	1.650	1.800	1.950	2.100
5	Terlindungi Bahasa dan Sastra Daerah yang Kritis dan Terancam Puhah	Jumlah Penutur Muda yang Terlibat dalam Pelindungan Bahasa Daerah Kritis dan Terancam Puhah	Orang	100	200	300	300	300

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	SATUAN	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
		Jumlah Penutur Muda yang Terlibat dalam Pelindungan Sastra Daerah Kritis dan Terancam Punah	Orang	100	200	300	300	300
		Jumlah Produk Kesastraan Terkembangkan	Sastra	7	3	3	3	3
6	Meningkatnya Tata Kelola Satuan Kerja di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Predikat SAKIP Satker minimal BB	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB
		Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker Minimal 91	Nilai	91	91	91	91	91

4.2 Kerangka Pendanaan

Kerangka indikasi kebutuhan dana untuk pelaksanaan kegiatan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk tahun 2021—2024 seperti pada tabel berikut. (data dalam ratusan ribuan rupiah)

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	2020	Indikasi Kebutuhan Dana			
				2021	2022	2023	2024
1.	Meningkatnya Daya Ungkap Bahasa Indonesia	Jumlah Kosakata Bahasa Indonesia	78,5	86,3	94,1	102,5	111,8
2.	Terwujudnya Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia	Jumlah rekomendasi kebijakan kebahasaan dan kesastraan melalui penelitian	348,8	380,1	414,4	451,7	492,3
3.	Terwujudnya Penggunaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik	Jumlah lembaga pengguna bahasa Indonesia terbina	297,5	324,3	353,5	385,3	419,9

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	2020	Indikasi Kebutuhan Dana			
				2021	2022	2023	2024
4.	Meningkatnya Jumlah Penutur Bahasa Terbina	Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional Terbina Kemahirab Berbahasa dan Bersastra	806,7	879,3	958,4	1.044	1138,7
5.	Terlindungi Bahasa dan Sastra Daerah yang Kritis dan Terancam Punah	Jumlah Penutur Muda yang Terlibat dalam Pelindungan Bahasa Daerah Kritis dan Terancam Punah	44,5	65,6	71,5	77,9	84,9
		Jumlah Penutur Muda yang Terlibat dalam Pelindungan Sastra Daerah Kritis dan Terancam Punah	49,6	67,7	73,8	80,4	87,6
		Jumlah Produk Kesastraan Berkembangkan	32,9	47,8	52,1	56,8	61,9
6	Meningkatnya Tata Kelola Satuan Kerja di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Predikat SAKIP Satker minimal BB	4.841,3	5.325,4	5.858	6443,8	7.088,1
		Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker Minimal 91					

BAB V

PENUTUP

Renstra Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan rancang induk serangkaian tindakan terkait dengan program dan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan tujuan dan sasaran strategis serta kebijakan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran dan pihak terkait di lingkungan Nusa Tenggara Barat. Sebagai UPT Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Renstra Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Renstra Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 2020—2024 yang memuat tujuan strategis, sasaran strategis, program, indikator program, dan kegiatan, serta fokus prioritas Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Renstra Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat ini juga memberikan arah kebijakan dan program kerja serta strategi implementasi untuk dapat mencapai target yang telah ditetapkan berdasarkan visi dan misi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dalam kurun waktu 2020—2024.

Dalam penanganan masalah kebahasaan dan kesastraan, Renstra Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat ini juga merupakan penjabaran Renstra Unit Eselon II di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, yakni Sekretariat Badan, Pusat Pengembangan dan Pelindungan, dan Pusat Pembinaan dan Pemasyarakatan.

LAMPIRAN 1: Matrik Kinerja dan Pendanaan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	SATUAN	TARGET					Alokasi (dalam ratusan ribu)				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya Daya Ungkap Bahasa Indonesia	Jumlah Kosakata Bahasa Indonesia	Lema	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	78,5	86,3	94,1	102,5	111,8
2	Terwujudnya Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia	Jumlah rekomendasi kebijakan kebahasaan dan kesastraan melalui penelitian	Dokumen	1	1	1	1	1	348,8	380,1	414,4	451,7	492,3
3	Terwujudnya Penggunaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik	Jumlah lembaga pengguna bahasa Indonesia terbina	Lembaga	100	150	200	200	250	297,5	324,3	353,5	385,3	419,9
4	Meningkatnya Jumlah Penuur Bahasa Terbina	Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional Terbina Kemahirab Berbahasa dan Bersastra	Orang	1.515	1.650	1.800	1.950	2.100	806,7	879,3	958,4	1.044	1138,7
5	Terlindungi Bahasa dan Sastra Daerah yang Kritis dan Terancam Punah	Jumlah Penutur Muda yang Terlibat dalam Pelindungan Bahasa Daerah Kritis dan Terancam Punah	Orang	100	200	300	300	300	44,5	65,6	71,5	77,9	84,9
		Jumlah Penutur Muda yang Terlibat dalam Pelindungan Sastra Daerah Kritis dan Terancam Punah	Orang	100	200	300	300	300	49,6	67,7	73,8	80,4	87,6

		Jumlah Produk Kesastraan Terkembangkan	Sastra	7	3	3	3	3	32,9	47,8	52,1	56,8	61,9
6	Meningkatnya Tata Kelola Satuan Kerja di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Predikat SAKIP Satker minimal BB	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB	4.841,3	5.325,4	5.858	6443,8	7.088,1
		Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker Minimal 91	Nilai	91	91	91	91	91					

LAMPIRAN 2: Definisi Operasional, Metode Penghitungan, dan Sumber Data

Kode	Indikator	Definisi Operasional	Metode Penghitungan	Sumber Data
IKK	Jumlah Kosakata Bahasa Indonesia	Jumlah kata beserta maknanya yang ada dan dipakai dalam komunikasi berbahasa Indonesia ragam formal maupun informal	Penjumlahan entri KBBI, kamus bidang ilmu, dan entri dalam kompilasi kamus Angka dasar diperoleh dari jumlah kosakata pada akhir tahun 2019. Target tiap tahun sebanyak 17.492 kosakata diperoleh dari selisih target 2024 dan angka dasar lalu dibagi selama 5 tahun $\text{Target} = (200.000 - 112.583) / 5$	1. KBBI Daring (https://kbbi.kemdikbud.go.id/) 2. Glosarium bidang ilmu (http://bahasasastra.kemdikbud.go.id/glosarium/), dan 3. Aplikasi kompilasi kamus (https://kbbi.kemdikbud.go.id/Kamus)
IKK	Jumlah rekomendasi kebijakan kebahasaan dan kesastraan melalui penelitian	Hasil dari penelitian bahasa dan sastra yang dirangkum dan disarikan menjadi rekomendasi kepada pimpinan guna menjadi bahan dalam pengambilan keputusan	Angka dasar 4 dokumen diperoleh berdasarkan dokumen kebijakan yang dimiliki Badan Bahasa pada tahun 2019. Pada tahun 2020, terdapat 43 dokumen kebijakan yang diperoleh dari UPT dan pusat. Dari pusat sebanyak 13 dokumen rekomendasi, sedangkan 30 dokumen diperoleh dari UPT. Target tahun 2021 s.d. 2024 sebanyak 32 dokumen dengan rincian UPT 30 dan Pusat 2 dokumen.	Lakip Badan Bahasa Tahun 2019
	Jumlah lembaga pengguna bahasa Indonesia	Jumlah lembaga pemerintah dan swasta yang diintervensi dalam hal penggunaan	Angka dasar sebanyak 1740 diperoleh dari lembaga pemerintah dan swasta yang	LAKIP Badan Bahasa Tahun 2019

	terbina	bahasanya, terutama untuk papan nama lembaga, papan petunjuk, dan sebagainya.	diintervensi pada tahun 2019,	
IKK	Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional Terbina Kemahiran Berbahasa dan Bersastra	Jumlah tenaga ahli khusus dan calon tenaga ahli yang dibina mutu penggunaan bahasa dan sastranya melalui pembelajaran dan masyarakat bahasa ke berbagai lapisan masyarakat.	Angka dasar sebanyak 66.409 orang diperoleh berdasarkan jumlah peserta yang dibina pada tahun 2019, antara lain melalui penyuluhan, pelatihan, dan sebagainya. Kenaikan tiap tahun berdasarkan target yang dirancang oleh tiap satker.	Lakip Badan Bahasa Tahun 2019
IKK	Jumlah Penutur Muda yang Terlibat dalam Pelindungan Bahasa Daerah Kritis dan Terancam Punah	1. Jumlah penutur muda yang terlibat dalam pelindungan bahasa daerah kritis dan terancam punah adalah jumlah penutur bahasa daerah dari kalangan generasi muda antara usia 10--19 tahun yang telah mengikuti kegiatan revitalisasi bahasa di suatu daerah persebaran bahasa daerah yang status bahasanya kritis dan terancam punah. 2. Karena sasaran kegiatan revitalisasi ditujukan untuk meningkatkan daya hidup bahasa daerah, pelindungan terhadap bahasa diprioritaskan pada bahasa yang kritis dan terancam punah. Oleh karena itu, sasaran kegiatan pelindungan bahasa ditargetkan agar bahasa dan sastra yang berada dalam kondisi kritis dan terancam	1. Penentuan indeks yang menjadi target sasaran program didasarkan pada bahasa yang kritis rata-rata indeks bahasa yang kritis (<20) dan yang terancam (<40) meningkat menjadi bahasa berstatus "mengalami kemunduran" (0,41--0,60), yakni target maksimal sekitar 0,54 hingga mendekati 0,59. 2. Penutur muda yang terlibat dalam gerakan atau kegiatan revitalisasi bahasa dan sastra disebut "Tunas Bahasa Ibu". Artinya, penutur muda itu tidak sekadar peserta kegiatan, tetapi pada tindak lanjut dalam bermasyarakat mereka diharapkan dapat menjadi pelopor dan teladan untuk generasi muda lainnya dalam menggunakan dan melestarikan bahasa dan sastra	1. Hasil pemetaan, kajian vitalitas, dan konservasi bahasa daerah (sumber data daring: petabahasa.kemdikbud.go.id, regbahasasastra.kemdikbud.go.id, labbineka.kemdikbud.go.id). 2. Hasil revitalisasi bahasa dan sastra daerah (sumber data daring: regbahasasastra.kemdikbud.go.id).

		punah itu meningkat statusnya menjadi berstatus (minimal) mengalami kemunduran.	daerah.	
IKK	Jumlah Penutur Muda yang Terlibat dalam Pelindungan Sastra Daerah Kritis dan Terancam Punah	1. Jumlah penutur muda yang terlibat dalam pelindungan sastra daerah kritis dan terancam punah adalah jumlah penutur/pendukung/pelaku muda sastra berbahasa daerah dari kalangan generasi muda antara usia 10--19 tahun yang telah mengikuti kegiatan revitalisasi sastra (khusus sastra lisan) di suatu daerah persebaran bahasa daerah yang status sastranya kritis dan terancam punah. 2. Karena sasaran kegiatan revitalisasi ditujukan untuk meningkatkan daya hidup sastra daerah, pelindungan terhadap sastra berbahasa daerah diprioritaskan pada sastra lisan yang berstatus kritis dan terancam punah. Oleh karena itu, sasaran kegiatan pelindungan bahasa ditargetkan agar bahasa dan sastra yang berada dalam kondisi kritis dan terancam punah itu meningkat statusnya menjadi berstatus (minimal) mengalami kemunduran.	1. Penentuan indeks yang menjadi target sasaran program didasarkan pada bahasa yang kritis rata-rata indeks bahasa yang kritis (<20) dan yang terancam (<40) meningkat menjadi bahasa berstatus "mengalami kemunduran" (0,41--0,60), yakni target maksimal sekitar 0,54 hingga mendekati 0,59. 2. Penutur muda yang terlibat dalam gerakan atau kegiatan revitalisasi bahasa dan sastra disebut "Tunas Bahasa Ibu". Artinya, penutur muda itu tidak sekadar peserta kegiatan, tetapi pada tindak lanjut dalam bermasyarakat mereka diharapkan dapat menjadi pelopor dan teladan untuk generasi muda lainnya dalam menggunakan dan melestarikan bahasa dan sastra daerah.	1. Hasil pemetaan, kajian vitalitas, dan konservasi bahasa daerah (sumber data daring: petabahasa.kemdikbud.go.id, regbahasasastra.kemdikbud.go.id, labbineka.kemdikbud.go.id). 2. Hasil revitalisasi bahasa dan sastra daerah (sumber data daring: regbahasasastra.kemdikbud.go.id).
IKK	Jumlah Produk Kesastraan	Produk sastra berkembang adalah produk dari hasil upaya	Jumlah penjumlahan hasil kritik sastra, alih wahana,	Hasil kegiatan pengembangan sastra di lingkungan Badan

	Terkembangkan	untuk memantapkan dan meningkatkan fungsi dan kedudukan sastra sebagai kekayaan budaya dan bagian dari sastra dunia melalui penelitian, peningkatan jumlah dan mutu karya sastra dan kritik sastra Indonesia; kodifikasi sastra; penyusunan bahan ajar; penerjemahan; pengalihwahan; dan publikasi hasil pengembangan sastra	entri/artikel kamus dan ensiklopedia sastra, serta acuan kesastraan.	Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
IKK	Predikat SAKIP Satker minimal CC	Rata-rata predikat SAKIP satker minimal CC berarti cukup (memadai), akuntabilitas kinerja cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar.	Angka dasar predikat CC berdasarkan rata-rata predikat SAKIP satker di lingkungan Badan Bahasa. Pada akhir 2014 ditargetkan rata-rata predikat satker ialah B.	Dokumen SAKIP dari Biro Keuangan, Kemendikbud
IKK	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker Minimal 91	Capaian kinerja berdasarkan kesesuaian antara perencanaan dan realisasi (target dan anggaran)	Pembandingan target dan anggaran dalam dokumen perencanaan dengan realisasi	1. PMK 214/PMK.02/2017 2. Aplikasi SMART DJA